



2024

RENCANA KERJA



**Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA**



IRLIZAR, S.Sos
NIP. 19730816 200212 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Linmas dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	 17
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	22
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	 25
4.1. Program dan Kegiatan	25
 BAB V PENUTUP	 26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna berupa memberdayakan sumber daya yang ada, memfungsikan segala komponen yang ada untuk mencapai target ditahun 2024. Tujuannya adalah agar semua fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna menjadi lancar dalam pelaksanaannya.

1. Tugas Pokok.

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan penegakan di bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- e. mengkoordinasikan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mematuhi dan menaati peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. mengkoordinasikan urusan pelatihan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- g. menetapkan program penegakan di bidang Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya; dan
- h. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Satuan.

2. Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- f. Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

3. Kewenangan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dengan Aparat Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mengetahui dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkungan tugasnya;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019-2024. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 84);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

memuat evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja, isu-isu penyelenggaraan tugas dan Fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan;

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

memuat telaah visi misi dan program kepala daerah, telaah renja Kementerian dan Provinsi, penetapan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran strategis;

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; memuat program dan kegiatan serta pagu anggaran; dan

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Linmas dan Capaian Renstra Perangkat Daerah TW I dan TW II

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 TW I dan II menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16.455.770.336,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.490.968.246 atau sebesar 33,37%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 TW 1 dan TW II dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - I.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - I.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - I.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - I.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - I.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - I.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - I.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - I.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - I.4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - I.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - I.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - I.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - I.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- I.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

- Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2 Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.6.3 Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.7.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- II.I Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- II.I.1 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- II.I.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- II.I.3 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- III.I Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- III.I.1 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- III.II Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- III.II.1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier

2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Komitmen dan kerjasama dari pimpinan unit pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna.

3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2024 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna s/d Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perindungan Masyarakat
Kabupaten Natuna pada Tahun 2024

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) Laporan Evaluasi Renja Per TW																											
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																											
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																											
PDSANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat																											
Kode	Sasaran	Uraian/Widang Uraian Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PO pada Tahun 2023 s.d 2026 (periode renstra PO)		Realisasi capaian kinerja Renstra PO sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PO yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PO s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PO s.d Tahun 2024		Keterangan				
					R		R		T		I		II		III		IV		12 = R+II+III+IV		12 = 12/7 x100			10 = R+T2		10 = 10/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp-Renja	K	Rp-DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1. URUAN PEMERINTAHAN WALAY YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.01.		URUAN PEMERINTAHAN BERAS STABILISASI DAN KETERBACAAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																									
1.01.01.		PROGRAM PEMULIANG URUAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	75.50	143,890,000	132.1	72,955,666	75.50	143,890,000	75.50	109,953,900	75.5	3,140,880	75.5	25,663,355		77	54,725,170	100.00	54.43	209.5	72,955,666	275.96	90.39		
1.01.01.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	143,890,000	105.23	72,955,666	70	143,890,000	70	109,953,900	65.5	3,140,880	65.5	25,663,355		66	54,725,170	53.57	54.43	230.73	72,955,666	329.88	90.39		
1.01.01.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	5,000,000		0	1	5,000,000	1	0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.01.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPTD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPTD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPTD	Laporan	2	100,000,000	10	72,055,666	2	100,000,000	2	100,953,000	2	3,140,880	2	25,663,355		2	54,725,170	100.00	54.43	12	72,055,666	600.00	52.28		
1.01.01.		PROGRAM PEMULIANG URUAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kasat masyarakat yang sesuai RPJ	Persen	65	16,301,785,031	176.5	25,232,467,681	65	16,301,785,031	65	16,172,025,761	65	4,957,005,681	65	5,133,958,758		66	13,503,644,525	100.00	95.66	203.5	25,232,467,681	327.65	176.65		
1.01.01.03.		Administrasi/Kewangan Perangkat Daerah	Kategori Waktu: Pembayaran Administrasi/Kewangan Perangkat Daerah	Tipei Waktu	1	7,383,300,031	3	16,107,448,333	1	7,383,300,031	1	6,840,232,868	1	3,147,482,388	1	3,323,907,808		1	6,608,748,830	100.00	64.61	3	16,107,448,333	330.00	263.39		
1.01.01.03.01.		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	7,383,300,031	179	16,111,410,222	18	7,383,300,031	18	6,510,232,956	18	2,117,160,399	18	3,323,907,805		18	6,006,716,540	94.31	94.16	291.1	16,111,410,222	290.81	263.39		
1.01.01.03.01.		Administrasi/Kepagawean Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Pegawai	Orang	10	5,000,000	0	0	10	5,000,000	10	0	10	0	10	0		10	0	0.00	0.00	10	0	0.00	0.00		
1.01.01.03.01.		Administrasi/Kepagawean Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Pegawai	Persen	10	170,000,000	0	6,432,779	10	170,000,000	10	239,387,390	10	2,604,570	10	3,828,409		10	6,432,779	999.00	3.12	10	6,432,779	999.00	3.14		
1.01.01.03.02.		Pengadaan Paketan Dinas beserta Asfuit Kelengkapannya	Jumlah-Paket Paketan Dinas beserta Asfuit Kelengkapan	Paket	2	172,000,000	0	6,432,779	2	172,000,000	2	239,387,390	0	6,804,100	0	3,828,409		0	6,432,779	0.00	3.12	0	6,432,779	0.00	3.14	Realisasi kinerja TW dan TW II tahun 2024	
1.01.01.03.03.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah-Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	6,000,000	0	10	10	6,000,000	10	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.03.04.		Administrasi/Kepagawean Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawean perangkat daerah	Persen	88	20,000,000	0	88	88	20,000,000	88	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.03.05.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah-Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20,000,000	0	20	20	20,000,000	20	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.03.06.		Administrasi/Kewangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum administrasi umum/perkantoran	Persen	76	362,800,000	160	668,263,027	76	360,800,000	76	628,808,380	20.82	127,732,024	16.48	124,146,788		16	264,862,808	20.84	67.08	168.68	668,263,027	320.84	174.96		
1.01.01.03.07.		Penyediaan Pendidikan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah-Paket Pendidikan dan Kelengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	92,000,000	2	76,545,060	2	92,000,000	2	44,069,000	1	6,221,300	1	16,598,950		1	37,769,950	50.00	95.85	3	76,545,060	150.00	62.75		
1.01.01.03.08.		Penyediaan Paketan Rumah Tangga	Jumlah-Paket Paketan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39,000,000	6	26,818,800	1	39,000,000	1	16,000,000	0	0	1	6,842,000		1	6,818,800	100.00	99.17	6	26,818,800	600.00	66.08		
1.01.01.03.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah-Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	0	1	23,000,000	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.03.09.		Penyediaan Bimbingan Teknis dan Pengabdian	Jumlah-Paket Bimbingan Teknis dan Pengabdian yang Disediakan	Paket	1	104,000,000	498.8	81,705,430	1	104,000,000	1	44,769,700	19.3	6,998,800	13.98	9,737,980		16	26,708,200	1,636.00	16.37	498.88	81,705,430	4,916,666.00	76.96		
1.01.01.03.06.		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah-Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Dokumen	1	15,000,000	2	6,895,000	1	15,000,000	1	5,000,000	0	0	0	0		0	2,000,000	0.00	40.00	2	6,895,000	200.00	45.57	Belum ada realisasi	

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024

9/27/24, 9:21 AM

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

Kode	Bab/ur	Uraian/Wilayah Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Subsidi	Target Rencana PD pada Tahun 2023 s.d 2025 (periode rencana PD)		Realisasi capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Kerja Peningkat Daerah Tahun 2024 (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tahun 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Rencana PD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Rencana PD s.d Tahun 2023		Keterangan	
					2023		2023		2024		I		II		12= I+II+III+IV		12=12/1 x100		10= I+II		10=10/10 x100			
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Disediakan																				Kinerja	
105.03.06.01		Penyediaan bahan/bahan	Jumlah Paket bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	0	1	1.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
108.03.06.06		Pengembangan Bapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Bapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	26	100.000.000	271	477.839.947	26	100.000.000	26	428.127.680	30	106.440.044	27	93.286.148	27	276.443.098	18.43	64.79	266	477.839.947	1.084.29	477.83
105.03.06.01		Pengadaan barang milik daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	1.486.999.999	100	562.705.469	75	1.563.399.999	75	594.469.999	1,06	26.395.599	16,89	34.593.259	10	305.699.750	34,38	95.43	106,89	562.705.469	167.44	23.49
108.03.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	2.270.000.000	3	291.850.000	1	1.770.000.000	1	100.000.000	0	0	2	70.980.000	2	70.980.000	200.00	30.36	6	291.850.000	800.00	6.87
105.03.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20.000.000	15	67.722.70	5	20.000.000	5	8.000.000	0	0	20	10.000.000	20	10.000.000	400.00	90.18	25	67.722.70	700.00	336.58
108.03.07.06		Pengadaan Perabotan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	6	96.000.000	6	296.369.790	6	96.000.000	6	369.400.000	2	20.269.000	12	29.620.260	12	29.689.790	240.00	64.74	16	296.369.790	380.00	163.48
105.03.07.07		Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit aset Tetap lainnya yang Disediakan	Unit	5	20.000.000	0	0	5	20.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
108.03.08		Penyediaan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana peningkatan urusan pemerintahan	Persen	70	6.748.989.000	100	6.484.989.823	70	6.726.989.000	70	3.987.000.000	0	1.170.862.261	0	1.264.293.048	0	3.802.712.222	0,00	80.38	109	6.484.989.823	207.14	167.57
105.03.08.01		Penyediaan Jasa Sunk Menyurut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sunk Menyurut	Laporan	3	3.000.000	304	16.596.000	3	3.000.000	3	10.000.000	300	3.600.000	300	3.600.000	300	3.600.000	10.000.00	95.00	694	16.596.000	20.485.67	693.20
108.03.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	89.800.000	10	89.800.989	2	89.800.000	2	71.000.000	3	16.800.989	3	10.800.987	3	16.802.726	180.00	49.89	16	89.800.989	800.00	79.49
105.03.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	5.657.395.000	14	6.395.446.824	2	5.657.395.000	2	3.900.000.000	162	1.673.446.795	16	1.346.254.692	16	1.054.626.667	6.050.00	93.14	175	6.395.446.824	8.750.00	147.05
108.03.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan sarana peningkat urusan pemerintahan	Persen	76	280.000.000	100	881.863.190	76	280.000.000	76	409.000.000	0	127.188.290	0	104.298.000	0	287.823.290	0,00	72.84	100	881.863.190	133.23	161.86
105.03.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	10	220.000.000	8	496.406.990	10	220.000.000	10	200.000.000	4	10.354.250	4	66.960.000	4	25.944.250	43.00	71.39	10	496.406.990	150.00	243.72
105.03.09.06		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	2	75.000.000	8	77.200.000	2	75.000.000	2	40.000.000	54	6.000.000	61	10.200.000	61	27.200.000	5.000.00	80.00	72	77.200.000	5.800.00	102.93
105.03.09.09		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	1	95.000.000	2	12.971.000	1	95.000.000	1	10.000.000	1	1.969.000	1	4.976.000	1	12.971.000	100.00	99.82	2	12.971.000	100.00	97.09
108.03.09.18		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemdukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	7	80.000.000	0	0	7	80.000.000	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
105.05		PROGRAM PENINGKATAN KETERMAMPUAN DAN KETERSEDIAAN UMUM	Cakupan Wilayah Peningkatan Perda serta Ketermampuan dan Keterlaksanaan Umum	Persen	80	940.000.000	90	770.989.398	80	1.582.000.000	80	1.182.187.320	6,11	200.275.209	1,36	216.376.223	2	790.223.194	1,46	62.42	61,96	770.989.398	77.46	127.04
105.05.2.06		Pemanganan Gangguan Ketermampuan dan Keterlaksanaan Umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Pemanganan Gangguan Ketermampuan dan Keterlaksanaan Umum yang ditangani	Persen	80	426.690.000	100	660.399.395	80	1.326.690.000	80	932.567.940	11,03	174.696.076	2,75	262.193.074	3	646.443.361	1,44	66.64	167,76	660.399.395	167,76	164.27
108.02.3.03.04		Pembekalan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan dan Keterlaksanaan umum	Jumlah Dokumen yang Manual Hasil Pembekalan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan dan Keterlaksanaan umum	Dokumen	1	20.000.000	1	75.281,87	1	20.000.000	1	64.760.780	1	31.460.260	0	14.300.417	1	73.669,87	100.00	86.09	2	75.281,87	100.00	142.89
108.02.3.03.08		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berhubungan Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	16	100.000.000	4	33.333,88	16	100.000.000	16	101.649.380	1	10.048,608	0	0	1	14.908,694	6,87	6,84	6	33.333,88	33,33	33,33
108.02.3.03.08		Penyusunan SOP Keterlaksanaan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Jumlah Dokumen SOP Keterlaksanaan Umum dan Keterlaksanaan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	80.000.000	0	0	1	80.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024

9/27/24, 9:21 AM

EKEJAP (Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan) | Laporan Evaluasi Renja Per TW

Kode	Bab/Item	Uraian/Wilayah Uraian Pemerintahan/Program/Kelembagaan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Bab/Item	Target Rencana PO pada Tahun 2023 s.d 2025 (periode rencana PO)		Realisasi capaian kinerja Renstra PO sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PO yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PO s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PO s.d Tahun 2023		Keterangan
					2023		2023		T				I				II		12: 8+9+10+11		13: 12/1 x100		14: 8+12		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5		6		7				8				9				10		11		15
1.05.02.1.04.05		Pengawasan Gangguan Ketertarikan dan keterlibatan Umum Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Penindakan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang dilaporkan Melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Penindakan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	0	180.000.000	0	952.070.640	0	1.080.000.000	0	725.666.000	1	101.000.000	1	247.000.000	1	952.070.640	9,8	76,30	1	952.070.640	9,8	107,28	Di TW I hanya diberikan kasus dan TW II hanya diberikan kasus
1.05.02.1.04.06		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan keterlibatan Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	Unit	3	65.000.000	0	3	65.000.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.02.1.05		Pengawasan Perilaku Masyarakat Terhadap Peraturan/Batas Wilayah Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Peraturan/Perilaku	Persen	80	92.000.000	0	95.228.844	80	182.000.000	80	148.499.840	2,4	22.004.954	2,4	45.898.836	24	95.228.844	92,00	95,00	24	95.228.844	92,00	106,34	
1.05.02.1.05.01		Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	30.000.000	0	1	30.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.02.1.05.02		Pengawasan Akas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Akas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP	Laporan	2	52.000.000	0	95.228.844	2	182.000.000	2	148.499.840	6	22.004.954	6	45.898.836	6	95.228.844	300,00	85,00	6	95.228.844	300,00	103,14	
1.05.02.1.05		Pembinaan Perilaku Masyarakat/Regent Sijil (PMS) Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan PMS	Persen	80	92.000.000	0	14.848.389	80	72.000.000	80	101.700.800	0	2.884.874	0	10.468.136	0	14.848.389	0,00	16,33	0	14.848.389	0,00	28,37	
1.05.02.1.05.06		Pengembangan kapasitas dan kiner PMS	Jumlah laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PMS Perangkat Perda	Laporan	2	52.000.000	0	14.848.389	2	72.000.000	2	101.700.800	0	2.884.874	0	10.468.136	0	14.848.389	0,00	16,33	0	14.848.389	0,00	28,37	Realisasi Kinerja dilaksanakan di TW II
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETERLIBATAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Persen	80	20.000.000	0	80	20.000.000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.02.1.01		Pengawasan Gangguan Ketertarikan dan keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pengawasan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang dihangani	Persen	80	20.000.000	100	0	80	20.000.000	80	0	11,03	0	3,78	0	3	0	3,44	0,00	107,76	0	107,19	0,00	
1.05.02.1.05.03		Perindakan Akas Pelanggaran Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Perindakan	Laporan	8	20.000.000	0	8	20.000.000	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna pada tahun 2024 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 2 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2024, Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna

No	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator	Capaian Kinerja Anggaran 2023			Capaian Kinerja Anggaran 2024		
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP.	Rp 4.834.854.000,00	Rp 4.810.820.217,00	99,50%	Rp 15.272.582.816,00	Rp 5.172.392.023,00	33,87%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran.	Rp 4.834.854.000,00	Rp 4.810.820.217,00	99,50%	Rp 15.272.582.816,00	Rp 5.172.392.023,00	33,87%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Rp 4.834.854.000,00	Rp 4.810.820.217,00	99,50%	Rp 15.272.582.816,00	Rp 5.172.392.023,00	33,87%

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024

2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.075.079.155,00	Rp. 1.015.171.084,00	94,42%	Rp. 1.183.187.520,00	Rp. 318.576.223,00	26.93%
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Rp. 830,841,283,00	807.615.368,00	97.20%	Rp. 932.987.090,00	Rp. 262.216.274.00	28..11%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 280.786.340,00	Rp. 278.966.490,00	99.35%	Rp. 725.686.000,00	Rp. 247.895.867,00	34.16%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 457.590.040,00	Rp. 442.306.764,00	96.66%	Rp. 84.751.710,00	Rp. 14.320.407,00	16.90%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp. 92.464.903,00	Rp. 86,342.114,00	93.38%	Rp. 122.549.380,00	Rp. -	0.00%

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Rp. 140.006.260,00	Rp. 129.528.104,00	92.52%	Rp. 146.499.840,00	Rp. 45.891.831,00	31.33%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Rp. 140.006.260,00	Rp. 129.528.104,00	92.52%	Rp. 146.499.840,00	Rp. 45.891.831,00	31.33%
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PPNS	Rp. 104.231.612,00	Rp. 78.027.612,00	74.86%	Rp. 103.700.590,00	Rp. 10.468.118,00	10.09%
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kafasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyeenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Rp. 104.231.612,00	Rp. 78.027.612,00	74.86%	Rp. 103.700.590,00	Rp. 10.468.118,00	10.09%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat agar dapat hidup tenang, tidak gelisah serta menumbuhkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hal ini pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Urusan pembangunan tentunya bukan hanya menjadi urusan pemerintah sendirian. Semua unsur harus mendukung dan ikut terlibat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat adalah kata kunci yang sangat strategis.

Selama ini harapan tersebut agak sulit dilaksanakan karena stigma negatif tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna hanyalah tukang gusur dan tukang tangkap pelajar yang berkeliaran saat jam belajar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gerakan Satuan Polisi Pamong Praja menuju Indonesia ramah sebagaimana yang diamanatkan Perpres No. 12 tahun 2016 dan Instruksi Mendagri No. 331.1/8024/Sj tahun 2017, konsep pembinaan, sosialisasi dan pencegahan harus ditonjolkan termasuk juga kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum akan dapat diwujudkan dengan

memetakan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;

- 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
 - 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan

- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2022, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,97 persen;
2. Indeks Status Mutu Air sebesar 50;
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,65;
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,19 persen;
5. Tingkat Aksesibilitas Daerah 15 Kecamatan;
6. Angka Kriminalitas (kasus) sebanyak 1:16,30;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar Indeks A (3,26).

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Serta Pengembangan Infrastruktur”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mempunyai prioritas yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan budaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata
3. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang optimal

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Serta Pengembangan Infrastruktur”**.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output.

Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Meningkatnya pelayanan publik yang prima dan Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Natuna

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip	77.56
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	96
3	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mematuhi Peraturan dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatnya Ketentraman, Kertiban Umum dan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	93
				Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	93

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten tahun 2024 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Satuan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Tahun 2024, maka penetapan prioritas pada urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna Tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Umum serta Perlindungan

Masyarakat. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 02 Januari 2024

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA**



IRLIZAR, S.Sos
NIP. 197308162002121004

USULAN MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN NATUNA

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat					18,171,785,031				28,541,995,000	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					18,171,785,031				28,541,995,000	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					18,171,785,031				28,541,995,000	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI		77.50	143,000,000			78.00	143,000,000	
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		80	143,000,000			85	143,000,000	
1.05.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kabupaten Natuna	1	5,000,000			1	5,000,000	
	Pembuatan Renstra Perubahan		Dokumen	Kabupaten Natuna	1	5,000,000	APBD	-	1	5,000,000	-
1.05.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kabupaten Natuna	2	138,000,000			2	138,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	Kabupaten Natuna	2	138,000,000	APBD	-	2	138,000,000	-

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	PERSEN		90	16,661,235,031			90	27,003,985,000	
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	7,182,300,031			1	12,000,000,000	
1.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kabupaten Natuna	120	7,182,300,031			150	12,000,000,000	
	Belanja Gaji dan tunjangan PNS dan PPPK		Orang/bulan	Kabupaten Natuna	88	7,182,300,031	APBD	-	120	12,000,000,000	-
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen		10	177,000,000			12	177,000,000	
1.05.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kabupaten Natuna	2	172,000,000			3	172,000,000	
	Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Harian		Paket	Kabupaten Natuna	1	86,000,000	APBD	-	1	100,000,000	-
	Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan		Paket	Kabupaten Natuna	1	86,000,000	APBD	-	1	72,000,000	-
1.05.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kabupaten Natuna	10	5,000,000			12	5,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas dan Kontribusi		Orang	Kabupaten Natuna	5	5,000,000	APBD	-	10	5,000,000	-
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	20,000,000			100	20,000,000	
1.05.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kabupaten Natuna	20	20,000,000			21	20,000,000	

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Bimtek		Orang	Kabupaten Natuna	5	20,000,000	APBD	-	20	20,000,000	-
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		75	382,500,000			75	382,000,000	
1.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	2	92,500,000			2	92,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket	Kabupaten Natuna	1	92,500,000	APBD	-	1	92,000,000	-
1.05.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	39,000,000			1	39,000,000	
	Belanja Alat Kebersihan dan Cairan Pembersih		Tahun	Kabupaten Natuna	1	39,000,000	APBD	-	1	39,000,000	-
1.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	25,000,000			1	25,000,000	
	Belanja Makanan Minuman Lapangan		Paket	Kabupaten Natuna	1	25,000,000	APBD	-	1	25,000,000	-
1.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	104,000,000			1	104,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Paket	Kabupaten Natuna	1	104,000,000	APBD	-	1	104,000,000	-
1.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kabupaten Natuna	1	15,000,000			1	15,000,000	
	Belanja Surat Kabar/Majalah		Dokumen	Kabupaten Natuna	1	15,000,000	APBD	-	1	15,000,000	-
1.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kabupaten Natuna	1	7,000,000			1	7,000,000	

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Obat-obatan		Paket	Kabupaten Natuna	1	7,000,000	APBD	-	1	7,000,000	-
1.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kabupaten Natuna	28	100,000,000			28	100,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Laporan	Kabupaten Natuna	28	100,000,000	APBD	-	28	100,000,000	-
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen		75	2,710,450,000			75	8,236,000,000	
1.05.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kabupaten Natuna	1	2,499,450,000			1	7,670,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Motor Trail Patroli)		Unit	Kabupaten Natuna	10	270,000,000	APBD	-	1	2,270,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Patroli)		Unit	Kabupaten Natuna	2	499,450,000	APBD	-	1	430,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Patroli)		Unit	Kabupaten Natuna	2	430,000,000	APBD	-	1	430,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Patwal)		Unit	Kabupaten Natuna	2	1,000,000,000	APBD	-	1	2,270,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 6 (Mobil Dalmas)		Unit	Kabupaten Natuna	1	300,000,000	APBD	-	1	2,270,000,000	-
1.05.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kabupaten Natuna	5	20,000,000			5	60,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja		Unit	Kabupaten Natuna	5	5,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip		Unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja		Unit	Kabupaten Natuna	5	5,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-
1.05.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kabupaten Natuna	5	171,000,000			5	466,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		Unit	Kabupaten Natuna	1	11,000,000	APBD	-	5	171,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi (HT)		Unit	Kabupaten Natuna	10	20,000,000	APBD	-	20	30,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Dispenser		Unit	Kabupaten Natuna	2	10,000,000	APBD	-	5	10,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Infokus		Unit	Kabupaten Natuna	1	10,000,000	APBD	-	1	10,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		Unit	Kabupaten Natuna	1	10,000,000	APBD	-	1	10,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Lampu Serine (Rotator)		Unit	Kabupaten Natuna	4	30,000,000	APBD	-	4	30,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Laptop		Unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000	APBD	-	5	10,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pendingin (Kulkas)		Unit	Kabupaten Natuna	1	10,000,000	APBD	-	5	10,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput		Unit	Kabupaten Natuna	2	10,000,000	APBD	-	1	5,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Printer		Unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000	APBD	-	5	50,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Saund System		Unit	Kabupaten Natuna	1	20,000,000	APBD	-	5	100,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Senter Sorot		Unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Televisi (TV)		Unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000	APBD	-	5	10,000,000	-
1.05.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Kabupaten Natuna	5	20,000,000			5	40,000,000	

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur Lipat Lapangan (Velbad)		Unit	Kabupaten Natuna	2	10,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Tenda Regu		Unit	Kabupaten Natuna	2	10,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		80	5,828,985,000			85	5,828,985,000	
1.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kabupaten Natuna	3	3,000,000			3	3,000,000	
	Belanja Penyediaan Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya		Laporan	Kabupaten Natuna	12	3,000,000	APBD	-	3	3,000,000	-
1.05.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kabupaten Natuna	2	88,000,000			2	88,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon		Laporan	Kabupaten Natuna	12	88,000,000	APBD	-	2	88,000,000	-
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kabupaten Natuna	2	5,737,985,000			2	5,737,985,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	Kabupaten Natuna	12	5,737,985,000	APBD	-	2	5,737,985,000	-
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen		85	360,000,000			90	360,000,000	
1.05.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kabupaten Natuna	12	200,000,000			13	200,000,000	

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	Kabupaten Natuna	12	200,000,000	APBD	-	12	200,000,000	-
1.05.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kabupaten Natuna	2	75,000,000			2	75,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Laporan	Kabupaten Natuna	12	75,000,000	APBD	-	2	75,000,000	-
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kabupaten Natuna	1	35,000,000			1	35,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	Kabupaten Natuna	1	35,000,000	APBD	-	1	35,000,000	-
1.05.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kabupaten Natuna	5	50,000,000			10	50,000,000	
	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Laporan	Kabupaten Natuna	12	50,000,000	APBD	-	5	50,000,000	-
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN		80	1,347,550,000			80	1,375,010,000	
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen		80	828,550,000			80	856,010,000	
1.05.02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	Dokumen	Kabupaten Natuna	1	22,000,000			1	22,000,000	

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Dokumen	Kabupaten Natuna	150	22,000,000	APBD	-	1	22,000,000	-
1.05.02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Kabupaten Natuna	21	100,550,000			25	101,000,000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Paket	Kabupaten Natuna	1	550,000	APBD	-	1	1,000,000	-
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat		Orang	Kabupaten Natuna	21	100,000,000	APBD	-	21	100,000,000	-
1.05.02.2.01.08.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	Kabupaten Natuna	1	60,000,000			1	60,000,000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Dokumen	Kabupaten Natuna	1	60,000,000	APBD	-	1	60,000,000	-
1.05.02.2.01.10.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	Kabupaten Natuna	10	65,000,000			10	65,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja		Orang	Kabupaten Natuna	10	65,000,000	APBD	-	10	65,000,000	-

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.02.2.0111.	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Dokumen	Kabupaten Natuna	1	50,000,000			1	50,000,000	
	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP		Dokumen	Kabupaten Natuna	1	50,000,000	APBD	-	1	50,000,000	-
1.05.02.2.0112.	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Orang	Kabupaten Natuna	8	65,000,000			10	65,000,000	
	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pol-PP		Orang	Kabupaten Natuna	8	65,000,000	APBD	-	8	65,000,000	-
1.05.02.2.0113.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Kabupaten Natuna	150	50,000,000			150	50,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan SatLinmas		Orang	Kabupaten Natuna	150	50,000,000	APBD	-	150	50,000,000	-
1.05.02.2.0114.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Kabupaten Natuna	10	50,000,000			10	50,000,000	
	Bintek Satpol PP dan SatLinmas		Orang	Kabupaten Natuna	10	50,000,000	APBD	-	10	50,000,000	-
1.05.02.2.0115.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan	laporan	Kabupaten Natuna	7	300,000,000			6	300,000,000	

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		Laporan	Kabupaten Natuna	7	300,000,000	APBD	-	7	300,000,000	-
1.05.02.2.0118.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	Kabupaten Natuna	5	66,000,000			8	93,010,000	
	Belanja Modal Pengadaan Lampu Lalin		Unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000	APBD	-	5	10,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Lampu Serine		Unit	Kabupaten Natuna	2	10,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Pakaian Huru Hara		Unit	Kabupaten Natuna	5	22,990,000	APBD	-	5	40,000,000	-
	Belanja Pengadaan Modal Tameng		Unit	Kabupaten Natuna	10	20,000,000	APBD	-	5	20,000,000	-
	BOP Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kegiatan	Kabupaten Natuna	1	3,010,000	APBD	-	1	3,010,000	-
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Persen		80	242,000,000			80	242,000,000	
1.05.02.2.02.04.	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan	Kabupaten Natuna	1	10,000,000			1	10,000,000	
	Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada		laporan	Kabupaten Natuna	1	10,000,000	APBD	-	1	10,000,000	-

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.02.2.02.05.	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen	Kabupaten Natuna	1	10,000,000			1	10,000,000	
	Pelaksanaan Penyusunan SOP Penegakan Perda/Perkada		dokumen	Kabupaten Natuna	1	10,000,000	APBD	-	1	10,000,000	-
1.05.02.2.02.06.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000			5	10,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Trantibum		unit	Kabupaten Natuna	5	10,000,000	APBD	-	5	10,000,000	-
1.05.02.2.02.07.	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kabupaten Natuna	1	10,000,000			1	10,000,000	
	Pelaksanaan Penyelidikan Pelanggaran Perda/Perkada		Laporan	Kabupaten Natuna	1	10,000,000	APBD	-	1	10,000,000	-
1.05.02.2.02.08.	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan	Kabupaten Natuna	1	10,000,000			1	10,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sidang		laporan	Kabupaten Natuna	1	10,000,000	APBD	-	1	10,000,000	-
1.05.02.2.02.09.	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokuman	Kabupaten Natuna	1	5,000,000			1	5,000,000	
	Pelaksanaan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS		Dokuman	Kabupaten Natuna	1	5,000,000	APBD	-	1	5,000,000	-

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.02.2.02.10.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kabupaten Natuna	1	30,000,000			1	30,000,000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Laporan	Kabupaten Natuna	1	30,000,000	APBD	-	1	30,000,000	-
1.05.02.2.02.11.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	Kabupaten Natuna	2	152,000,000			2	152,000,000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Laporan	Kabupaten Natuna	1	152,000,000	APBD	-	1	152,000,000	-
1.05.02.2.02.12.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kabupaten Natuna	1	5,000,000			1	5,000,000	
	Pelaksanaan Pengawasan Atas Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda/Perkada		Laporan	Kabupaten Natuna	1	5,000,000	APBD	-	1	5,000,000	-
1.05.02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan PPNS	Persen		50	272,000,000			50	272,000,000	
1.05.02.2.03.02.	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	Kabupaten Natuna	2	50,000,000			2	50,000,000	
	Sekretariat PPNS		Dokumen	Kabupaten Natuna	2	50,000,000	APBD	-	2	50,000,000	-

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.02.2.03.03.	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kabupaten Natuna	2	50,000,000			2	50,000,000	
	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan		Dokumen	Kabupaten Natuna	2	50,000,000	APBD	-	2	50,000,000	-
1.05.02.2.03.04.	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Kabupaten Natuna	2	50,000,000			2	50,000,000	
	Pelaksanaan Pembentukan PPNS		Laporan	Kabupaten Natuna	2	50,000,000	APBD	-	2	50,000,000	-
1.05.02.2.03.05.	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	Kabupaten Natuna	2	50,000,000			2	50,000,000	
	Operasional Sekretariat PPNS		Laporan	Kabupaten Natuna	2	50,000,000	APBD	-	2	50,000,000	-
1.05.02.2.03.06.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	Kabupaten Natuna	2	72,000,000			2	72,000,000	
	Bimtek Kapasitas dan Karier PPNS		Orang	Kabupaten Natuna	2	72,000,000	APBD	-	2	72,000,000	-
1.05.02.3.05.	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	Cakupan Satgas Linmas Kabupaten	Persen		65.7	5,000,000			68.4	5,000,000	
1.05.02.3.05.01.	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan	Kabupaten Natuna	1	5,000,000			1	5,000,000	
	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan		Kegiatan	Kabupaten Natuna	1	5,000,000	APBD	-	1	5,000,000	-
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETERTIBAN DAN	PERSEN		95	20,000,000			100	20,000,000	

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KETERANGAN
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		KETENTRAMAN MASYARAKAT									
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen		80	20,000,000			80	20,000,000	
1.05.02.2.01.16.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	Kabupaten Natuna	6	20,000,000			5	20,000,000	
	Pelaksanaan Penindakan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada		Kasus	Kabupaten Natuna	6	20,000,000	APBD	-	6	20,000,000	-
JUMLAH						18,171,785,031				28,541,995,000	

Ranai, 18 Maret 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat



IRLIZAR, S. Sos
NIP. 19730816 200212 1 004